

# REFORMASI KEBIJAKAN ARAB SAUDI: VISION 2030 DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR PEREKONOMIAN

**Rievy Dzarivauri**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.*

*Email: rievvdzarivauri8@gmail.com*

---

## Abstrak

Artikel ini mengulas pereformasian kebijakan Arab Saudi yaitu Vision 2030 dan implikasinya terhadap bidang perekonomian yang ada di negara Arab Saudi. Artikel ini mengeksplorasi kebijakan yang di reformasi dengan adanya vision 2030 di Arab Saudi, yang memiliki dampak terhadap perekonomian di negara tersebut. Artikel ini membahas tentang perekonomian yang terjadi di negara Arab Saudi dan potensi masalah kebijakan terkait dengan bagaimana ekonomi dapat berkembang. Hambatan terhadap perkembangan sosio-ekonomi yang dinamis, seimbang, dan berjangka panjang menciptakan ancaman tidak hanya untuk membuat Kerajaan Arab Saudi tertinggal dari kelompok negara maju, tetapi juga untuk mencapai titik tidak dapat kembali dalam ketertinggalan ini dan kemungkinan besar meningkat.

Bagian prakiraan menilai konsekuensi yang mungkin terjadi bagi perkembangan sosial-ekonomi kerajaan dari percepatan proses dekarbonisasi ekonomi dunia, memperkuat isolasionisme ekonomi di tingkat negara dan regional. Dengan adanya prospek kerja yang baru dalam mengubah kebijakan yang ada dalam negara Arab Saudi yakni "vision 2030", untuk meningkatkan angka perekonomian dalam negara tersebut kerajaan mengubah beberapa kebijakan-kebijakan yang ada ke kebijakan yang lebih modern seperti yang tertera dalam program "vision 2030" untuk memajukan dan memperkuat sosial ekonomi di Arab Saudi. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Meneliti dengan cara membaca beberapa literatur dari jurnal, artikel, dan berita yang beredar tentang materi penelitian ini. Proses dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dari penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dari munculnya reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Adapun dari kebijakan yang di reformasi oleh kerajaan Arab Saudi menghasilkan implikasi terhadap bidang perekonomian di Arab Saudi.

**Kata kunci:** vision 2030, Arab Saudi, Ekonomi, Reformasi kebijakan

## Abstract

This article examines Saudi Arabia's Vision 2030 policy reform and its implications for the country's economy. This article explores the reformed policies of Vision 2030 in Saudi Arabia, which have an impact on the country's economy. This article discusses the current economy in Saudi Arabia and potential policy issues related to how the economy can develop. Obstacles to dynamic, balanced and long-term socio-economic development create a threat not only to keep the Kingdom of Saudi Arabia behind the group of developed countries, but also to reach a point of no return in this lag and most likely increase.

The forecast section assesses the possible consequences for the socio-economic development of the Kingdom of the acceleration of the decarbonization process of the world economy, strengthening economic isolationism at the state and regional levels. With the prospect of new work in changing the existing policies in the country of Saudi Arabia, namely "vision 2030", to increase economic figures in the country the kingdom changed some of the existing policies to

more modern policies as stated in the "vision 2030" program to advance and strengthen the social economy in Saudi Arabia. The type of research used is qualitative research. Research by reading some literature from journals, articles, and news circulating about this research material. The process of this research uses a qualitative method in which this writing aims to describe the facts that exist from the emergence of policy reforms carried out by Saudi Arabia. As for the policies reformed by the kingdom of Saudi Arabia, it produces implications for the economic sector in Saudi Arabia.

**Keywords:** Vision 2030, Saudi Arabia, Economy, policy reforms

## Pendahuluan

Salah satu negara yang berasal dari kawasan timur tengah yaitu negara Arab Saudi yang merupakan salah satu negara yang bergantung pada ekspor minyak yang diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Arab Saudi juga merupakan negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Energy Information Administration mengeluarkan data yang menyatakan bahwa, Arab Saudi menduduki posisi pertama dari tahun 1989 sampai tahun 2016 sebagai negara yang mengekspor minyak terbanyak. Tetapi, sejak dari pertengahan tahun 2014 harga minyak turun secara drastis.

Sejak tahun 2009, untuk pertama kalinya harga minyak mentah yang awalnya \$100 per barel turun di bawah \$50 per barel pada awal Januari 2015. Meskipun harga minyak kembali pulih setelah itu, ada indikasi bahwa harga minyak mentah akan turun dan tidak akan naik kembali dalam waktu dekat. Sampai dengan tahun 2015, Arab Saudi masih memiliki ketergantungan pendapatan terhadap minyak. Hal ini dibuktikan dengan 72 persen pendapatan Arab Saudi berasal dari pendapatan minyak dan 28 persen berasal dari pendapatan non-minyak. Dari ketergantungan tersebut menyebabkan Arab Saudi mengalami defisit sebanyak 367 miliar riyal.

Akhirnya keuangan dari Arab Saudi mengalami penurunan disebabkan harga minyak yang rendah, dan pemerintah mengumumkan rencana untuk mengecilkan catatan defisit

anggaran negara dengan melakukan pemotongan pengeluaran dan dorongan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber yang non minyak. Selain itu, dari ketergantungan Arab Saudi dengan minyak masalah potensial bagi angka perekonomian Arab Saudi yakni masalah pengangguran (Nugraha, 2018). Pada tahun 2030 diperkirakan sekitar 45 juta warga negara Arab Saudi yang memiliki usia di bawah 30 tahun nanti akan memasuki usia angkatan kerja, yang dimana memiliki jumlah yang melebihi totalan warga negara Arab Saudi sendiri yang memiliki pekerjaan pada saat ini.

Oleh karena itu, muncullah perumusan dari kebijakan Saudi Vision 2030 untuk memperbaiki dan menjadi solusi dari permasalahan yang terkait dengan kondisi minyak yang naik turun dan ancaman untuk angka perekonomian di Arab Saudi. Arab Saudi vision 2030 ini dicetuskan pada tahun 2016 oleh putra mahkota Mohammed bin Salman yang sekaligus memiliki jabatan sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dan Wakil Perdana Menteri (Kinninmont, 2017).

Saudi vision 2030 adalah kebijakan untuk melakukan reformasi pemerintahan yang ada di negara Arab Saudi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan sektor swasta di Arab Saudi melalui investasi di industri non-minyak, pengadaan pasukan militer lokal, serta privatisasi industri milik pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor swasta yang

dapat menyediakan sumber ekspor non-minyak. Selain itu juga dapat menghasilkan pertumbuhan minyak, dan mempekerjakan warga negara Arab Saudi yang berusia muda (Thompson, 2017).

Dalam perjalanannya, Saudi Vision 2030 sudah mulai melaksanakan reformasi dalam bidang ekonomi dan sosial, yang menjadikan perekonomian Arab Saudi lebih terbuka dengan adanya diversifikasi ekonomi. Saudi Vision 2030 memiliki tiga pilar utama, di antaranya A Vibrant Society, Thriving Economy, dan An Ambition Nation. Dalam bidang sosial masyarakat, Saudi Vision 2030 di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman menerapkan tindakan untuk menyingkirkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Salah satunya adalah fatwa tentang larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah dan bekerja.

Muhammad bin Salman menganggap bahwa kaum perempuan harus memiliki produktivitas dan harus sejajar dengan laki-laki dalam memajukan negara secara aktif. Arab Saudi juga telah membuka peluang ekonomi dalam sektor investasi. Investasi perdana yang dibuka adalah penjualan saham BUMN Arab Saudi pada sektor minyak bernama Aramco yang bisa mencapai \$100 miliar. Sedangkan dalam bidang sosial masyarakat, khususnya perempuan sudah diberikan izin atau kebebasan untuk berkendara dan memasuki stadion atau tempat keramaian lainnya.

Pemerintah juga meningkatkan industri pariwisata yang berpotensi akan menjadi destinasi wisata yang besar pada tahun 2030, serta tempat tempat hiburan yang berada di sekitar Kerajaan Arab Saudi. Berbanding terbalik dengan sektor ekonomi dan sosial, dalam sektor politik pemerintah Arab Saudi masih melakukan tindakan yang otoriter, dan

masih terdapat larangan untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap pemerintah (Seymour, 2012).

Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, Arab Saudi mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi. Khashoggi merupakan seorang jurnalis yang melakukan kritikan terhadap tindakan reformasi yang diambil oleh Muhammad bin Salman yang dianggap kontroversial. Dalam negara Arab Saudi tidak mengizinkan untuk media media independen, dimana media tersebut dijaga dan diawasi secara ketat oleh pihak berwenang (Pujayanti, 2018). Berdasarkan data dari World Press Freedom Index, jumlah jurnalis masyarakat yang berada dalam tahanan meningkat terus-menerus sejak awal 2017. Dalam perjalanannya, kebijakan yang diubah oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang di tamping dalam program program vision 2030, mengubah negara tersebut menjadi lebih modernisasi dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini menjadi penting untuk diteliti melihat bagaimana reformasi dari kebijakan Arab Saudi dalam program vision 2030 ini berdampak terhadap jalannya sektor perekonomian di Arab Saudi.

Beberapa referensi yang penulis ambil dari rujukan pada penelitian Jane Kininmonth yang berjudul "Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation". Penelitian ini membahas tentang rencana jangka panjang Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi minyak, dan negara meningkatkan investasi di sektor swasta. Vision 2030 menyiratkan derajat liberalisasi sosial untuk memungkinkan tumbuhnya industri hiburan dan pariwisata, serta

reformasi ekstensif terhadap sistem pendidikan.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa dalam Vision 2030 akan secara signifikan mengubah berbagai elemen kontrak sosial di Arab Saudi. Jika terlaksana sesuai dengan perencanaan, akan mengubah hubungan ekonomi antar warga negara dengan pemerintah, mengganggu beberapa struktur yang bersifat tradisional, dan pada akhirnya menyebabkan kebebasan sosial yang meluas. Renegosiasi kontrak sosial yang efektif menjadi sangat penting apabila negara ingin melembagakan dan mengamankan perubahan ekonomi yang dilakukan.

Penelitian yang ditulis oleh Jane Kininmonth ini membantu penulis untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam pembangunan sektor perekonomian negara tersebut. Referensi selanjutnya, penulis mengambil penelitian dari Abhishek Deshwal yang berjudul "Revisiting the Theory of Late Rentierism: The Special Case of Kuwait". Penelitian tersebut membahas tentang munculnya negara-negara minyak baru dan promosinya ke barisan depan perdagangan dunia dan keuangan menghidupkan kembali konsep rentier economy (Kinninmont, 2017).

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari pengamatan data ekonomi di seluruh negara, data tentang ekspatriat, dan warga negara bahwa faktor-faktor ini tidak beroperasi di Kuwait, dimana ide late rentierism tidak berlaku di negara tersebut. Di negara Kuwait sewa per kapita tetap tinggi, tidak ada diversifikasi ekonomi yang sebanding dengan Uni Emirates Arab atau Qatar yang terjadi di negara tersebut, dan ekonomi pun hampir sepenuhnya bergantung pada minyak. Berdasarkan penelitian dari Abhishek Deshwal ini, penulis mendapatkan

gambaran bahwa gagasan klasik tentang teori rentier state bahwa minyak menghambat demokrasi tidak terlihat konsisten dengan dialami oleh Kuwait dimana fitur-fitur rentier dan demokrasi berjalan ke arah yang sama. Referensi lainnya yang penulis rujuk melalui artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Turhan Yani yang berjudul "Wacana Pemerintahan Demokratis dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah (Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki).

Artikel tersebut membahas tentang demokrasi yang merupakan otoritas rakyat yang bertentangan dengan pemilihan umum yang berkuasa, supremasi warga sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan pertanggungjawaban pemerintah, tidak berlaku di negara-negara Arab. Menerapkan demokrasi dan mempertahankannya akan membutuhkan perubahan bertahap dan disengaja seperti yang disebut oleh Bernard Lewis. Hal tersebut yang akan membawa negara-negara ini ke proses reformasi dari otokrasi politik ke sistem politik yang terbuka dan kompetitif. Demokrasi di negara-negara Arab akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan kebebasan politik untuk berbicara secara budaya dan sosial serta partisipasi individu dalam politik sulit didapatkan di negara-negara Arab (Yani, 2007).

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana reformasi kebijakan yang dilakukan oleh negara Arab Saudi yakni dalam vision 2030 dalam implikasi di sektor perekonomian di negara Arab Saudi. Karena Arab Saudi sebagai negara yang sangat bergantung kepada penghasilan minyak bumi mengalami penurunan dalam pendapatan negaranya, karena terjadinya penurunan harga minyak pada tahun 2014. Selain ketergantungan dengan minyak, masalah pengangguran juga menjadi hal yang

potensi yang harus diantisipasi oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Arab Saudi kemudian merumuskan kebijakan Saudi Vision 2030 yang di dalamnya terdapat modernisasi ekonomi dan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif yang mana dari penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dari munculnya reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna ataupun data bukan perluasan data. Di samping itu, metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni penulisan ini berfokus pada penyampaian fakta fakta yang ada dalam pereformasian kebijakan yaitu dalam program program yang ada di vision 2030 yang memiliki implikasi terhadap sektor perekonomian.

### **Hasil dan pembahasan**

Arab Saudi yang merupakan salah satu negara dari kawasan timur tengah memiliki ketergantungan terhadap ekspor minyak. Arab Saudi sendiri merupakan pengekspor minyak terbesar di dunia. Meskipun menjadi pengekspor minyak terbesar, Arab Saudi bukan hanya satu satunya negara yang memiliki ekspor minyak namun hampir seluruh negara yang ada di kawasan timur tengah memiliki usaha tersebut untuk memajukan perekonomian mereka.

Setelah bertahun tahun jalannya perekonomian di Arab Saudi tumbuh dengan begitu cepat dan signifikan, dimana hal tersebut disebabkan oleh perekonomian yang berdasar pada sektor minyak. Tetapi dengan masalah yang terjadi, yaitu jatuhnya harga minyak membuat kerajaan sadar bahwa tidak bisa lagi mengedepankan sektor minyak. Sehingga dari kondisi tersebut kerajaan menyadari bahwa adanya potensi lain selain minyak yang memberikan peluang untuk memperbaiki dan membangun kembali perekonomian yang sempat jatuh dan jauh dari angka perekonomian negara negara lain (Cozza, 2016).

Oleh karena itu, kerajaan merencanakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis melalui produktivitas dan juga investasi. Adanya reformasi ekonomi adalah langkah konkrit yang dilakukan untuk tidak lagi bergantung terhadap minyak saja dengan membantu memastikan pertumbuhan, lapangan kerja, serta kehidupan masyarakat Saudi yang makmur dan sejahtera.

Reformasi ekonomi yang sementara dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi disebut dengan "Saudi Vision 2030" merupakan sebuah transformasi ekonomi yang ambisius dengan tujuan untuk menjadikan kerajaan sebagai jantung dunia Arab dan Islam, pusat investasi dan pusat penghubung antara 3 benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Melihat letak wilayah dari Arab Saudi yang strategis menjadikan kerajaan ini sebagai gerbang perdagangan global. Dengan adanya reformasi ini, pendapatan Saudi akan diarahkan pada sektor non-minyak serta menjadikan kerajaan ini terbuka pada semua agama dan dunia internasional (Nugraha, 2021).

Arab Saudi memiliki potensi penuh pada tahun 2030 sehingga dengan itu merencanakan adanya transformasi ekonomi dengan menargetkan pada

tahun 2030 yakni, PDB dapat bertumbuh dua kali lipat yakni sekitar 800 miliar USD; 4 triliun USD akan diinvestasikan dalam ekonomi non-minyak terutama dari sektor swasta; angkatan kerja masyarakat Saudi akan bertambah sebanyak 6 juta pekerja; pendapatan rumah tangga akan meningkat sebesar 60 %. Delapan sektor yang akan menghasilkan pertumbuhan dan juga pekerjaan yaitu pertambangan, pariwisata, petrokimia, keuangan, manufaktur, konstruksi, perdagangan serta kesehatan.

Adanya 3 keutamaan dalam Saudi Vision 2030 yaitu, a vibrant society, a thriving economy, dan an ambitious nation. Setiap poin tersebut, hal yang disoroti ialah komitmen dan representasi sebagai suatu ambisi dari tujuan yang ingin dicapai oleh Arab Saudi. Visi ini dapat dikatakan pula sebagai acuan dalam kebijakan masa depan kerajaan, sehingga dengan ini semua proyek dapat dijalankan selaras dengan isinya (Whucherpfenig & Deutsch, 2009).

Tema yang pertama ialah a vibrant society atau masyarakat yang dinamis, dimana masyarakat dapat hidup sesuai dengan prinsip Islam yang moderasi yang menjadi kebanggaan identitas nasional. Prinsip dari Islam moderasi menjadi kekuatan pendorong baik dalam menjalankan nilai-nilai toleransi, disiplin, keunggulan, maupun transparansi. Dalam bidang jasa, akan berfokus untuk melayani para pengunjung Umrah dengan memberikan keramahan, kenyamanan serta memperlancar proses visa. Hal ini dilakukan dengan memulai modernisasi dan meningkatkan kapasitas untuk menyambut pengunjung Umrah dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun.

Dalam mempromosikan identitas nasional, akan membangun lebih banyak museum, tempat wisata dan situs bersejarah. Melihat dari tema tersebut

juga Arab Saudi menyadari bahwa adanya kekayaan suatu negara tidak hanya terletak pada sumber dayanya saja, melainkan kekayaan yang sebenarnya adalah terletak di sumber daya manusia. Sehingga pemerintah berupaya untuk mendorong kontribusi masyarakat dalam menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut dimulai dengan melakukan adanya penyediaan proyek proyek untuk masyarakat. Selain itu pula, adanya budaya dan hiburan merupakan hal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, dari sini pemerintah akan mendukung upaya daerah, lembaga non-profit maupun sektor swasta. Dan terakhir ingin meningkatkan peran dana pemerintah serta menarik investor lokal dan internasional serta menciptakan kemitraan dengan perusahaan luar negeri. Melalui langkah yang dilakukan oleh kerajaan, mendorong pemerintah untuk memperkuat masyarakat pada identitas nasional yang telah mengakar.

Masuk pada tema kedua, Arab Saudi memfokuskan pada pengembangan ekonomi (thriving economy) jangka panjang dan berkelanjutan. Dimana kerajaan ingin mengembangkan sektor lain dan melepaskan ketergantungan terhadap pendapatan minyak. Pengembangan ekonomi ini memberikan kesempatan pada semua masyarakat baik itu pria, wanita, tua dan muda.

Sehingga mereka dapat berkontribusi yang terbaik dari kemampuan yang dimiliki. Salah satu aset yang paling menonjol adalah generasi muda, dimana lebih dari setengah populasi Arab Saudi berusia di bawah 25 tahun. Dengan demikian pemerintah mengambil peluang dari peran pemuda dengan memperluas ekonomi kewirausahaan dan juga perusahaan, dimana hal tersebut

termasuk dalam upaya diversifikasi perekonomian.

Pengembangan ekonomi secara khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dari 11.6 % menjadi 7 %, meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20 % menjadi 35 % dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22 % menjadi 30 %. Selain itu, privatisasi aset negara termasuk perusahaan Aramco akan meningkatkan pendapatan domestik dengan mentransfer kepemilikan Aramco terhadap Dana Investasi Publik.

Ada beberapa sektor yang mendorong keberhasilan ekonomi seperti sektor manufaktur, pertambangan, teknologi dan sektor pariwisata. Pada saat bersamaan, pemerintah Arab Saudi terus melakukan diversifikasi ekonomi dengan melokalisasikan sektor minyak dan gas. Kemudian, pemerintah juga akan meningkatkan kontribusi sektor swasta jangka panjang, dengan demikian akan membuka peluang investasi baru, memfasilitasi investasi, menghapus hambatan dan mendorong inovasi. Selain itu, zona khusus akan disediakan bagi pariwisata maupun industri.

Selanjutnya pada tema terakhir yaitu bangsa yang memiliki ambisius, adalah kesadaran pemerintah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas secara jelas dalam kontrol terhadap proyek-proyek yang memberi pengaruh yang signifikan bagi perkembangan ekonomi Saudi. Pemerintah juga merasa perlu untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk berkontribusi dalam mencapai nilai-nilai Islam dan tradisi nasional dengan menghormati, mendukung, membantu, serta meningkatkan keramahan dan menghargai hak setiap orang.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan masyarakat ke arah yang saling menguntungkan dengan membangun kehidupan profesional, meningkatkan produktivitas para pekerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang tepat, memberdayakan organisasi non-profit dan mendorong bisnis masyarakat sehingga dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari Arab Saudi dalam tema ini untuk meningkatkan tabungan rumah tangga dari 6 % menjadi 10 % dari total pendapatan rumah tangga serta meningkatkan kontribusi sektor non-profit terhadap PDB yaitu kurang dari 1 % menjadi 5 % dengan menerapkan standar tata kelola yang baik dan memfasilitasi pelatihan berkualitas tinggi (Gaussee, 2011).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saat ini pemerintah memang belum mengidentifikasi dan memberlakukan cara-cara terbaik untuk memastikan para pekerja dapat memiliki keterampilan yang tepat bagi masa depan mereka. Akan tetapi, pada tahun 2020, akan ada pelatihan pada 500.000 pekerja/karyawan, serta bagi lembaga pemerintahan dan kementerian diinstruksikan untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dengan menerapkan manajemen kinerja yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia. Dari segi pelayanan lembaga pemerintah, akan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas belanja pemerintah.

Dalam pelayanan di berbagai sektor juga akan meningkatkan kualitas, menyediakan lapangan pekerjaan yang tepat bagi masyarakat dengan biaya yang tidak mahal serta mentransfer pengetahuan. Vision 2030 merupakan langkah reformasi yang ambisius yang sementara dijalani oleh Arab Saudi, memiliki target untuk masa depan yang

lebih baik bagi kerajaan dan masyarakat Saudi. Dengan dikeluarkannya visi ini dapat mengembangkan strategi perekonomian dan meningkatkan kualitas kinerja. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kesuksesan setiap proyek (Kinninmont, 2017).

Pemerintah telah berkomitmen untuk meluncurkan program menyeluruh untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Keadaan yang dilalui oleh Arab Saudi yang sempat mengalami krisis ekonomi dan juga dinamika masyarakat yang ultra konservatif mempengaruhi tindakan untuk melakukan adanya reformasi. Terjadinya reformasi Arab melalui Saudi vision 2030 yang menjadi langkah untuk kebijakan ekonomi kerajaan.

Ketiga tema yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pilar dalam Vision 2030 dimana memiliki arah/tujuan dengan target yang telah ditetapkan pada masing-masing proyek. Melalui pilar pertama yaitu masyarakat yang *dinamis vibrant society* mengarahkan kerajaan menuju ke Islam moderat. Sejak dikeluarkannya vision 2030, putra mahkota Arab Saudi mendapatkan sorotan dalam berita utama selama beberapa bulan terakhir karena reformasi kebijakan tersebut.

Dari vision 2030 merupakan sebuah visi untuk menjadi negara yang toleran dengan islam sebagai konstitusi dan moderasi sebagai metodenya. Karena selama jalannya kerajaan ini bersifat tertutup dengan aturan yang ketat dan juga kaku. Sehingga melalui visi yang sedang dijalankan ini, akan mengarahkan kerajaan kembali pada islam yang moderat. Dalam wawancara yang dilakukan Majalah Time dengan Mohammed bin Salman, MBS menjelaskan bahwa pasca tahun 1979, dimana ekstrimis mencoba untuk

mewakili Islam. Praktik itu bukanlah praktik Islam melainkan praktek orang-orang yang telah membajak Islam setelah tahun 1979, dan praktik ekstrimis tersebut tidak selaras dengan gagasan Arab Saudi yang mengikuti agama Islam.

Pemerintah pun telah menjalankan sejumlah langkah nyata dengan tidak membiarkan siapapun menyebarkan dan memberi dukungan pada kaum ekstrimis atau teroris dan semacamnya. Hal ini dilakukan dengan cara memecat ribuan imam yang menyebarkan paham ekstrimis. Selain itu, pemerintah Saudi juga bekerja sama dengan Moskow dalam perlawanan terhadap teroris. Dalam bidang pendidikan juga, dilaksanakannya modernisasi sistem pendidikan dengan maksud agar mencegah potensi salah tafsir. Tidak hanya itu, larangan mengemudi bagi kaum perempuan telah dicabut sehingga perempuan dapat memiliki SIM dan berkendara sendiri.

Dalam bidang olahraga dan pertunjukan, perempuan juga diizinkan untuk menghadiri pertandingan olahraga di stadion dan bioskop telah dibuka. Dengan demikian, segregasi bagi kaum perempuan sedikit demi sedikit telah dilunturkan dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik (Thompson, 2017).

Reformasi ekonomi Arab Saudi tidak dapat diimplementasikan tanpa ada aktor yang menggerakkannya. Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota Arab Saudi menjadi pencetus sekaligus arsitek dalam reformasi yang direalisasikan melalui program Saudi Vision 2030.

Keputusan untuk melaksanakan reformasi dibuat oleh MBS dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi kerajaannya. Reformasi ekonomi merupakan kebijakan yang ia buat dengan konsekuensi yang lebih menguntungkan daripada tidak

melakukan reformasi sama sekali. Terjadinya ketidakstabilan ekonomi kerajaan, kondisi sosial yang kaku serta tingkat pengangguran yang meningkat, kondisi tersebut menjadi penggerak untuk dilaksanakannya reformasi dengan segera.

MBS merupakan aktor yang mampu melihat potensi lain yang dimiliki oleh kerajaan selain komoditas tunggal yang dijadikan sebagai pendapatan utama perekonomian (Haryadi, 2018). Potensi lain yang dimaksud ialah sumber daya manusia, dimana lebih dari setengah populasi Saudi berasal dari pemuda. Selain itu juga partisipasi perempuan dalam angkatan pekerjaan sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, sektor pariwisata memiliki potensi yang besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan maupun menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Kemudian banyak sektor lain lagi yang dikembangkan oleh kerajaan dan disebut dengan diversifikasi.

Adanya tiga poin penting dalam pemilihan reformasi yang dilakukan oleh MBS yakni, MBS melihat keadaan yang terjadi dalam sosial maupun ekonomi di Arab, lalu poin kedua MBS berusaha untuk memaksimalkan utilitas subjektifnya yakni ia mengejar keuntungan yang maksimal dengan berusaha memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Poin ketiga, sebelum MBS mengambil keputusan kebijakan yang ada, MBS memiliki preferensi yaitu melakukan reformasi atau tidak melakukan reformasi.

Disebabkan reformasi adalah tindakan yang sangat penting dan dibutuhkan untuk dilakukan segera, maka MBS memilih tindakan reformasi sebagai preferensi yang tepat berdasarkan keputusan yang ia buat demi memaksimalkan utilitas. Jika tidak melakukan reformasi, maka tidak ada harapan untuk masa depan

perekonomian Arab Saudi. Setiap keputusan memiliki resiko, namun MBS mengambil keputusan dengan resiko yang lebih menguntungkan. Harapan Mohammed bin Salman terhadap Arab Saudi yaitu menjadikan kerajaannya lebih terbuka terhadap dunia internasional dan melepaskan ketergantungan terhadap minyak.

MBS telah melakukan sejumlah tur ke luar negeri lebih banyak dari ayahnya untuk mempromosikan kerajaan Arab Saudi dan meningkatkan kerjasama ekonomi serta melakukan kesepakatan investasi. Selain itu meningkatkan pariwisata tidak hanya pada aspek religius tapi juga non-religius, dengan cara memudahkan visa bagi wisatawan internasional. Tidak hanya itu, situs-situs pariwisata juga ditingkatkan dengan gencarnya. Langkah tersebut diwujudkan dengan Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk menjadikan kerajaan sebagai jantung dunia Arab dan Islam, pusat investasi dan pusat penghubung tiga benua.

Oleh sebab itu, dengan adanya Saudi vision 2030 Arab Saudi dapat mengembangkan perekonomian dengan progress yang positif. Seperti, Proyek Neom telah disebut sebagai “proyek paling ambisius di dunia” yang bertujuan memposisikan kerajaan Arab Saudi di garis depan dalam bidang teknologi, inovasi, pariwisata dan keramahan bisnis di wilayah tersebut. Putra Mahkota Arab Saudi menjelaskan bahwa Neom akan berfokus pada sembilan sektor investasi khusus dan kondisi kehidupan yang akan mendorong masa depan peradaban manusia, energi dan air, mobilitas, bioteknologi, makanan, teknologi, manufaktur maju, media dan hiburan dengan landasan layak huni. Sektor-sektor ini akan merangsang pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi dengan memelihara inovasi dan manufaktur internasional, untuk mendorong industri

lokal, penciptaan lapangan pekerjaan serta dengan demikian PDB kerajaan akan bertumbuh.

Proyek-proyek yang telah diperkenalkan dan sementara dijalankan mencerminkan ambisi pemerintah bagi masyarakat Saudi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah saja, melainkan ambisi masyarakat diperlukan untuk kesejahteraan bersama. Sehingga dengan itu, masing-masing elemen dalam kerajaan Saudi dibutuhkan untuk saling bekerja sama meningkatkan produktivitas dan membangun kehidupan profesional. Hal tersebut merupakan program program yang ada dalam vision 2030 untuk jalannya pengembangan perekonomian di Arab Saudi.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas. Bahwasanya dari pereformasian kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni dengan membuat program program baru yang ada dalam bagian Saudi vision 2030 menghasilkan dampak terhadap sektor perekonomian di Arab Saudi. Melalui kebijakan yang diubah dalam vision 2030, kerajaan arab Saudi menyadari bahwa adanya potensi lain selain minyak yang memberikan peluang untuk memperbaiki dan membangun kembali perekonomian yang sempat jatuh dan jauh dari angka perekonomian negara negara lain.

Oleh karena itu, kerajaan merencanakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis melalui produktivitas dan juga investasi. Adanya reformasi ekonomi adalah langkah konkrit yang dilakukan untuk tidak lagi bergantung terhadap minyak saja dengan membantu memastikan pertumbuhan, lapangan kerja, serta kehidupan masyarakat Saudi yang makmur dan sejahtera. Dalam

jalannya tindakan tindakan di program vision 2030 ini terlihat dari MBS yang merupakan aktor yang mampu melihat potensi lain yang dimiliki oleh kerajaan selain komoditas tunggal yang dijadikan sebagai pendapatan utama perekonomian.

Potensi lain yang dimaksud ialah sumber daya manusia, dimana lebih dari setengah populasi Saudi berasal dari pemuda. Selain itu juga partisipasi perempuan dalam angkatan pekerjaan sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, sektor pariwisata memiliki potensi yang besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan maupun menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Kemudian banyak sektor lain lagi yang dikembangkan oleh kerajaan dan disebut dengan diversifikasi.

Hal tersebut dikarenakan reformasi adalah tindakan yang sangat penting dan dibutuhkan untuk dilakukan segera, maka MBS memilih tindakan reformasi sebagai preferensi yang tepat berdasarkan keputusan yang ia buat demi memaksimalkan utilitas. Jika tidak melakukan reformasi, maka tidak ada harapan untuk masa depan perekonomian Arab Saudi. Meskipun keputusan kebijakan yang diambil oleh MBS banyak ditentang oleh ulama, namun hal tersebut berjalan efektif bagi jalannya perekonomian Arab Saudi untuk kedepannya.

### **Daftar Pustaka**

- Alboaouh, K. dan Mahoney, J. (2017). Religious and Political Authority in the Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects. *MANAS Journal of Social Studies*, 6(2)
- Cozza, J. (2016). Could Vision 2030 Reforms Destabilize Saudi Arabia. *IndraStra Global*, 2.
- Gausse F.G. (2011). *Saudi Arabia in The New Middle East*. USA: Council on Foreign Relation.

- Haryadi,P. (2018). Peran Muhammad bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi. *Jurnal ICMES*, 2 (1).
- Kinninmont, J. (2017). *Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation*. Middle East and North Africa Program
- Nugraha, F. (2021). Arab Vision 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi. 2018. <https://www.medcom.id/internasional/opini/ybJ68v6b-visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi> (accessed January 30, 2021).
- Pujayanti, A. (2018). Tewasnya Jamal Khashoggi dan Implikasinya bagi Hubungan Luar Negeri Arab Saudi. *Info Singkat*, 10 (21).
- Seymour, B.B. (2012). *The Death of Rentierism in the Kingdom of Saudi Arabia*. The University of Utah
- Sianturi, N. (2017). Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia. *JOM FISIP*, 4 (2).
- Thompson, M.C. (2017). Saudi Vision 2030: A Viable Response to Youth Aspirations and Concern. *Asian Affairs*, 213.
- Wucherpfennig, J. dan Deutsch, F. (2009). Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited. *Living Reviews in Democracy*, 2.
- Yani, M.T. (2007). Wacana Pemerintahan Demokratis dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah (Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki). *Islamica*, 1(2).